



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMIR MACHMUD
2. Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN USAHA
3. NHK : 823156

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.355.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/80 m2 di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 1032 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 192.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/300 m2 di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/21 m2 di CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/50 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 302.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/70 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 985.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 650.234.500

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.990.234.500

III. HUTANG Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.840.234.500

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.